



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

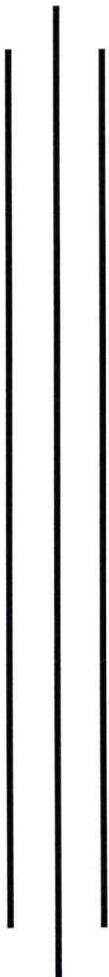
WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXIV : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025



Kata Pengantar

Dengan memanjangkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun anggaran 2025 yang mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Kota Batam tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang mengalami perubahan secara cepat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2025, semoga perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

*Salam Santun Dari Negeri Jiran
Senyum Diberi Dekat Sejengkal
Renja Disusun Sebagai Acuan
Membangun Negeri Di Era Digital*

Batam, 1 Juli 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA



RUDI PANJAITAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19761123 199511 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	5
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	16
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Catatan Penting.....	29
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	30
4.3 Rencana Tindak Lanjut	30

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I
- Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Passal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan Undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/ terbaru*);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); *bagi Perangkat Daerah yang memiliki SPM*
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: (7,44/2021);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 225 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2021 - 2026;
8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun (Berita Daerah Kota Batam Tahun Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- * Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- * Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- * Program Aplikasi dan Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
- * Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

* Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah

Program/kegiatan di atas adalah semua program dan kegiatan yang dilakukan di Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam. Program/kegiatan tersebut belum memenuhi target dikarenakan di triwulan I kegiatan tersebut masih dilaksanakan atau belum selesai pekerjaannya.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Program/kegiatan yang telah memenuhi target belum ada atau belum bisa dinilai/diukur pada triwulan I, dikarenakan pada triwulan I program/kegiatan tersebut masih dilaksanakan atau belum selesai pekerjaannya.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Program/kegiatan yang melebihi target belum ada atau belum bisa dinilai/diukur pada triwulan I, dikarenakan pada triwulan I program/kegiatan tersebut masih dilaksanakan atau belum selesai pekerjaannya.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1			2	3	4	5	6 = 5/4*100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	16	0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Percentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		
2	16	0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		
2	16	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan
2	16	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-
2	16	0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%		
2	16	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-
2	16	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-
2	16	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	-
2	16	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	25%
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%		
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	-	-
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	-	-
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	25 %
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	-	-
2	16	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkna Pajaknya	1 Unit	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	-	-
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	-	-
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	74,59%		
2	16	02	2.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100%		
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	3 Laporan	25%
2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	3 Rekomendasi	25%
2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	3 Konten	25%
2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100 Media	25 Media	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	3 Permohonan	25%
2	16	02	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	-	-
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	3.00; 4.00; 4.00	-	-
2	16	03	2.0	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	264 Layanan	-	-
2	16	03	2.01	04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	-	-
2	16	03	2.0	2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	3.25; 4.00	-	-
2	16	03	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	-	-
2	16	03	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	16	03	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	-	-
2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	41 Aplikasi	-	-
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100%
2	16	03	2.02	27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	-	-
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2	21	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3.00; 3.00 level	-	-
2	21	0	2.0	1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	85.83%	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	-	-
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	3 Perangkat Daerah	-	-
2	21	02	2.0	2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat	Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	85,71 Persen	-	-
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45 Perangkat Daerah	-	-
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	100%	-	-
2	20	02	2.0	1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100%	-	-
2	20	02	2.01	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	27%	27%
2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	80%	80%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renja 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I (s.d Maret Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
2	20	02	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai Indeks	3.00	Nilai Indeks	-	Penilaian dilakukan oleh KemenPAN-RB di tahun berikutnya
2.	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai Indeks	3.70	Nilai Indeks	-	Penilaian dilakukan oleh KemenPAN-RB di tahun berikutnya
3.	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai Indeks	4.00	Nilai Indeks	-	Penilaian dilakukan oleh KemenPAN-RB di tahun berikutnya
4.	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai Indeks	3.18	Nilai Indeks	-	Penilaian dilakukan oleh KemenPAN-RB di tahun berikutnya
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	Nilai Indeks	87	Nilai Indeks	-	Penilaian dilakukan di akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat tergambar melalui isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada awal tahun 2025 tepatnya pada tanggal 22 Januari 2025, Presiden

terpilih mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini dikeluarkan oleh Presiden dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara dan daerah. Efisiensi ini diharapkan dapat dicapai melalui pemangkasan belanja yang tidak prioritas dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Sesuai dengan Instruksi Presiden tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami efisiensi sebesar Rp.534.287.845,- terhadap kegiatan dan pengadaan rutin operasional kantor lainnya. Sehingga pagu APBD tahun 2025 murni sebesar Rp. 28.897.052.436,- setelah mengalami efisiensi menjadi Rp.28.362.764.591,- namun hal ini secara umum tidak terlalu berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Isu strategis Diskominfo Pemerintah Kota Batam yaitu :

1. Rencana induk, arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan, implementasi dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya;
5. Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum terlaksana secara optimal;
6. Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal bahkan cenderung parsial dan sektoral.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
 - 2) Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Subkegiatan Layanan Hubungan Media
 3. Program Aplikasi dan Informatika
 - a. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
 - 1) Subkegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 2) Subkegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
 - 2) Subkegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

Kode			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan		
					Sebelum	Sesudah	Sebelu m	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	16	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Percentase Administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	16.795.675.376	17.683.381.414	887.706.038		
	16	0	1	2.0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Percentase realisasi anggaran PD	100 %	100 %	15.276.559.836	15.276.559.836	-
	16	01	2.	00	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	104 Orang / bulan	104 Orang / bulan	15.220.549.836	16.033.157.004	812.607.168
	16	01	2.	00	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	56.010.000	56.010.000	-
	16	0	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Percentase Kelengkapan	100 %	100 %	-	-	-	

							Dokumen Kepegawaian ASN							
	16	01	2.0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14 Orang	-	-	-		
	16	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase Pelayanan kesekretariatan yang ditangani tepat waktu sesuai prosedur	72 Paket	72 Paket	353.079.900	205.797.800	-147.282.100	
	16	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.091.400	4.542.600	-4.548.800	
	16	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	99.070.500	55.887.200	-43.183.300	
	16	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	4.000.000	-1.000.000	
	16	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang C e t a k a n d a n Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	50.688.000	43.336.000	-7.352.000	
	16	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	189.230.000	98.032.000	-91.198.000	

	16	0	2.0	7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persen	100 Persen	830.597.000	1.011.631.210	-181.034.210	
	16	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 laporan		231.303.000	440.328.210	209.025.210	
	16	01	2.0	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	484.095.000	484.095.000	-	
	16	01	2.0	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	94 Unit	12 Unit	115.199.000	87.208.000	-27.991.000	
	16	0	2.0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%		36.873.640	37.290.400	416.760	
	16	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	2.257.200	6.210.000	3.952.800	
	16	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.616.440	31.080.400,00	-3.536.040	

	16	0	1	2.0	9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	24 Unit		298.565.000	339.495.000	40.930.000	
	16	01	2.0	9	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkna Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.780.000	63.780.000	24.000.000	
	16	01	2.0	9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	7 Unit	216.365.000	240.365.000	24.000.000	
	16	01	2.0	9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit	50 Unit	42.420.000	35.350.000	-7.070.000	
	16	0	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah	100 Persen	100 Persen	5.525.770.146	10.496.265.577	4.970.495.431	

						daerah kabupaten/kota	daerah kabupaten/kota							
	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan (Percentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Cakupan (Percentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100 Persen	100 Persen	5.525.770.146	10.496.265.577	4.970.495.431	
	16	02	2.01	00 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomen dasi	12 Rekomendasi	6.830.000	5.340.000,00	1.490.000	
	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penyusunan Konten	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi Publik	12 Konten	12 Konten	642.536.290	786.509.545,00	143.973.255	
	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	100 Media	100 Media	4.188.765.856	9.050.309.232,00	4.970.495.431	

							media berbayar sesuai kriteria/juknis							
	16	02	2.0 1	06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	12 Permohonan	30.970.000	23.330.000,00	-7.640.000	
	16	02	2.0 1	07	Layanan Hubungan Media	Relasi Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	291.600.000	291.600.000,00	-	
	16	0 3			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA		Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Tingkat Ketersediaan Aplikasi Informatika	100 Media		6.291.686.914	6.456.967.992	165.281.078	

	16	0 3	2.0 1	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik 543)	Jumlah Dokumen Penetapan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	3.00; 4.00; 4.00 Indeks Indeks Indeks	3.00; 4.00; 4.00 3 4.00 Indeks Indeks Indeks	64.824.680	64.824.680	-		
	16	03	2.0 1	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Pendaftaran Nama Domain dan sub domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama domain pemerintah desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan sub domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama domain pemerintah desa	1 Dokumen	1 Dokumen	64.824.680	64.824.680	-	
	16	0 3	2.0 2		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola; Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola	Jumlah Dokumen e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.25; 4.00 Indeks 3.25, 4.0 aspek	3.25; 4.00 Indeks 3.25, 4.0 aspek	6.226.862.234	6.392.143.312	165.281.078	
	16	03	2	01	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.661.754.000,00	1.661.754.000	-	
	16	03	2.0 2	00 18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur	1 Dokumen	1 Dokumen	52.764.000	48.912.000	-3.852.000	

					rencana SPBE Pemerintah Daerah		dan peta rencana yang diusulkan	domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan								
	16	03	2.0 2	00 20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	41 Aplikasi	41 Aplikasi	1.360.948.434	1.570.877.512	209.929.078			
	16	03	2.0 2	00 21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	74.279.800	74.279.800	-			
	16	03	2.0 2	00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangka t Daerah	27 Perangkat Daerah	665.820.000	665.820.000	-			
	16	03	2.0 2	00 27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		1 Program	1 Program	40.796.000	-	-40.796.000			

	16	03	2.0	00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	31 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.370.500.000	2.370.500.000	-	
	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi; Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	85.83 %	85.83 %	103.236.000	61.608.000	-41.628.000	
	21	02	2.0	1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	85.83 %	85.83 %	101.436.000	59.808.000	-41.628.000	
	21	02	2.0	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	60.004.000	39.004.000	-21.000.000	

	21	02	2.0	00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	2 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	41.432.000	20.804.000	-20.628.000	
	21	02	2.0	02	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat		Persentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah yang teramankan	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	2 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	-	
	21	02	2.0	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	85,83 Persen		1.800.000	1.800.000	-	
	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral yang dapat dibagi pakaikan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah	100 Persen	100 Persen	180.684.000	157.790.000	-22.894.000	
	20	02	2.0	01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah		Persentase data statistik sektoral yang tersedia	Jumlah Produsen data yang menyediakan data statistik sektoral	100 Persen	100 Persen	180.684.000	157.790.000	-22.894.000	
	20	02	2.0	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Persen	100 Persen	40.602.000	37.962.000	-2.640.000	

						Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan							
	20	02	2.0 1	00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	100 Persen	100 Persen	105.708.000	105.708.000	-
	20	02	2.0 1	00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina data statistik	1 Dokumen	1 Dokumen	34.374.000	14.120.000	-20.254.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dilakukan penambahan anggaran di beberapa sub kegiatan antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tugas ASN, hal ini dikarenakan penyesuaian gaji PNS dan penyesuaian gaji dikarenakan penerimaan P3K.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, hal ini dikarenakan penyesuaian tagihan telepon di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, terkait penambahan BBM. Hal tersebut dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu mendampingi kegiatan-kegiatan di Pemerintah Kota Batam, terutama kegiatan Pimpinan Daerah.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terkait penambahan BBM. Hal tersebut dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu mendampingi kegiatan-kegiatan di Pemerintah Kota Batam, terutama kegiatan Pimpinan Daerah.
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, hal ini dikarenakan penambahan kerjasama dengan media.

6. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, hal ini dikarenakan penyesuaian gaji tenaga ahli IT.

Akan tetapi diluar penambahan diatas, juga banyak terdapat pengurangan anggaran. Hal ini sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan pencapaian hasil pada trimester selanjutnya agar sesuai dengan target – target yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan pada capaian realisasi pada trimester pertama diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan pengendalian / monitoring dan evaluasi. Bentuk pengendalian tersebut antara lain dengan melakukan rapat internal demi mengawal pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan mencari

permasalahan dan solusi yang kemungkinan bisa menghambat pencapaian realisasi kegiatan, agar seluruh program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD